

ABSTRAK

Nugi Hexandra, Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas. **Skripsi. Program Study Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura Pontianak 2022.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Provinsi Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak di Kabupaten Sambas, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn dalam Nugroho, dalam teori tersebut terdapat beberapa indikator yaitu Ukuran/standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor. Kondisi Ekonomi, sosial dan politik. komunikasi antarorganisasi, Kecenderungan (*disposition*) dari Pelaksana/implementor. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual yaitu 1. Sumber daya manusia DP3AKB kurang untuk jumlah pegawai dan kurang untuk pegawai yang memiliki keahlian khusus seperti psikologi. Untuk sumber daya keuangan juga mengalami kekurangan karena anggaran untuk DP3AKB tidak besar, hal ini membuat DP3AKB mengalami keterbatasan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penambahan pegawai untuk dinas DP3AKB dan menjadikan DP3AKB sebagai prioritas untuk anggaran. 2 faktor lingkungan sosial masyarakat yang kurang peduli dengan sesama warga dan juga faktor ekonomi yang membuat warga sulit untuk melakukan konsultasi terhadap korban karena memerlukan biaya yang besar solusinya adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan juga mengetahui mekanisme pelaporan jika ada kasus dan untuk ekonomi yaitu menyediakan satgas satgas di tiap kecamatan agar bisa memantau dan melakukan konsultasi lebih dekat dan mengurangi penggunaan biaya.

Kata kunci : Implementasi, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Faktor Penghambat

ABSTRACT

Nugi Hexandra, Implementation of West Kalimantan Regional Regulation No. 4 of 2015 concerning Child Protection in Cases of Sexual Violence Against Children in Sambas Regency. **Thesis. Public Administration Study Program. Faculty of Social Science and Political Science. Tanjungpura University Pontianak 2022.**

This study aimed to analyze the inhibiting factor in conducting the implementation of the Kalimantan Barat Provincial Regulation Number 4 of 2015 on Child Protection toward child violence in Sambas Regency. This study used Van Metter and Van Horn's policy implementation theory cited from Nugroho which was in this theory there were several indicators, namely size/standards and policy targets, resources, characteristics of the executing agent/implementor, economic, social as well as political conditions, inter-organizational communication, and the tendency (disposition) of the executor/implementor. This study also used the descriptive research method with a qualitative approach. The results of this study showed that there were several inhibiting factors in the implementation of Kalimantan Barat Provincial Regulation Number 4 of 2015 on Child Protection in Cases of Sexual Violence. Firstly, the human resources of DP3AKB were lacking in the number of employees and lacking employees who had special expertise such as psychology. There was also a shortage of financial resources because the budget for DP3AKB was not large which caused DP3AKB to experience limitations in implementing the policy. It is better to add employees to the DP3AKB service and make DP3AKB a priority for the budget. Secondly, the social environmental factor, people did not care about their fellow inhabitants. Lastly, the economic factors made it difficult for residents to consult victims because it required a lot of money. Therefore, the researcher suggests conducting socialization in the community so that people care more about the environment and also know the mechanism for reporting if there are cases and for the economy, providing a task force in each district so that they can monitor and conduct closer consultations and reduce costs.

Keywords: Implementation, Sexual Violence on Children, Inhibiting Factor.

